

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota. Dana ini ditujukan untuk mendukung berbagai kegiatan di desa, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, pembinaan kehidupan sosial masyarakat, serta pemberdayaan warga desa. Permasalahan pelik bagi masyarakat desa adalah kelangkaan modal (*lack of capital*) (Suarmanayasa *et al.*, 2023). Namun dalam implementasinya, pengelolaan Dana Desa di berbagai wilayah masih menghadapi tantangan, seperti ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi, kurangnya kapasitas manajerial aparatur desa, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut (Purnamawati & Adnyani, 2020).

Besaran Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kondisi geografis yang menyulitkan akses dan pembangunan (Julita & Abdullah, 2020). Dengan mempertimbangkan aspek – aspek tersebut diharapkan pendistribusian dana desa yang didapat pada setiap desa yang ada di di Indonesia lebih adil dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan 1 pemerintahannya secara mandiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakatnya. Pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian aktivitas yang meliputi penerimaan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pelaporan, hingga pertanggungjawaban atas keuangan yang dimiliki desa (Julita & Abdullah, 2020). Sedangkan menurut Devi *et al.*, (2019) Pengelolaan keuangan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, terutama Kepala Desa bersama perangkat yang berwenang.

Pengelolaan yang dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan desa. Hal ini sejalan dengan temuan Purnamawati & Hatane, (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan implementasi sistem akuntansi yang memadai berkontribusi terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, selain memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan keuangan desa juga harus ditopang oleh ketersediaan dana yang mencukupi. Cara pengelolaan keuangan ini berperan penting dalam menentukan efektivitas penggunaan Dana Desa, karena keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut dirancang dan dimanfaatkan.

Salah satu desa yang rutin mendapatkan dana dari anggaran pendapatan belanja negara ( APBN ) adalah desa Baktiseraga yang terletak di Provinsi Bali Kabupaten Buleleng. Dana tersebut telah digunakan untuk berbagai program

pembangunan, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan sosial, maupun pelestarian lingkungan. Pada tahun 2022, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menginisiasi program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang aktif mengembangkan sektor pariwisata. Pengelolaan keuangan yang akuntabel pada desa wisata sangat krusial karena dana desa seringkali dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes yang berisiko tinggi jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian (Sujana *et al.*, 2020). Menurut Purnamasari & Adnyani, (2021) selain aspek kehati-hatian finansial, pengelolaan aset pada desa wisata di Bali juga menuntut adanya harmonisasi antara pemerintah desa dan masyarakat adat agar tidak terjadi konflik kepentingan yang menghambat pembangunan. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa sekaligus mendorong perubahan sosial, pelestarian budaya, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa (Rona *et al.*, 2022).

Desa Baktiseraga Merupakan salah satu kategori desa wisata maju. Wisata yang ditawarkan cukup beragam untuk menarik para wisatawan dalam maupun luar negeri. Wisata yang ditawarkan adalah “Diving, Dolphin Tour, dan Pelepasan Tukik” tidak hanya itu Desa Baktiseraga juga memiliki berbagai kegiatan ketahanan pangan yang rutin dilakukan dan dikelola secara terus menerus dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, kegiatan tersebut meliputi peternakan dalam kota yang terfokus pada peternakan kambing, pembudidayaan ikan nila, serta urban farming dengan menggunakan lahan terbatas. Keunggulan dari urban farming yang dilakukan Desa Baktiseraga adalah masyarakatnya dapat membeli hasil perkebunan secara langsung dan memilih sayuran yang diinginkan.

Kegiatan tersebut secara tidak langsung akan menjadi sumber pendapatan asli desa yang menunjang berbagai aspek pada desa Baktiseraga, ini diperkuat dengan data laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja periode tahun 2020 s.d. 2024 yang disajikan pada Tabel 1.1.

*Tabel 1. 1* Laporan Realisasi APBDes Desa Baktiseraga

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Dana Desa</b>	<b>Realisasi Dana Desa</b>	<b>Selisih</b>	<b>Persentase Capaian Alokasi (%)</b>
2020	1.669.303.000,00	1.630.718.861,01	38.584.138,99	97,69%
2021	1.756.769.000,00	1.699.902.701,46	56.866.298,54	96,76%
2022	1.778.642.800,00	1.676.782.877,33	101.859.922,67	94,27%
2023	1.883.165.900,00	1.814.310.696,47	68.855.203,53	96,34%
2024	3.141.908.322,94	2.515.121.164,51	626.787.158,43	80,05%

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama terletak pada ketidakkonsistenan realisasi anggaran Dana Desa di Desa Baktiseraga selalaporan realisasi APBDes Desa Baktiseraga tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika pengelolaan anggaran yang kurang stabil, dimana pada tahun 2020, tingkat realisasi mencapai 97,69%, menunjukkan pengelolaan yang cukup efektif. Di tahun 2021 dan 2022, persentase pencapaian sedikit menurun menjadi 96,76% dan 94,27%, dengan selisih anggaran yang mulai membesar, menandakan potensi masalah efisiensi atau pelaksanaan program. Tahun 2023 masih mencatat realisasi tinggi (96,34%), tetapi diiringi dengan peningkatan selisih yang mengarah pada kecenderungan penggunaan anggaran yang kurang optimal. Fenomena paling terlihat dari tahun tahun sebelumnya yaitu terjadi pada tahun 2024, di mana anggaran melonjak drastis hingga lebih dari Rp 3 miliar, namun

tingkat serapan justru turun menjadi 80,05% dengan selisih mencapai Rp626.000.000

Kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai gejala biasa, melainkan mengidentifikasi adanya ketidaksiapan struktural dan manajerial dalam mengelola lonjakan anggaran. Penurunan tingkat realisasi tersebut tidak hanya mencerminkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan anggaran, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam perencanaan program, penyerapan kegiatan, serta kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa.

Fenomena ini mencerminkan persoalan yang juga terjadi secara luas di berbagai desa di Indonesia, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Meskipun program desa wisata dan ketahanan pangan telah dilaksanakan di Desa Baktiseraga, namun lonjakan anggaran yang tidak diiringi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai justru dapat menghambat keberlanjutan pembangunan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara besarnya anggaran dengan kesiapan sistem manajemen desa dalam menyerap dan memanfaatkan dana secara optimal untuk menjawab kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat. Jika tidak ditangani secara sistematis, maka desa berisiko kehilangan arah pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan hanya fokus pada penggunaan dana jangka pendek. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan solusi berupa penguatan sistem perencanaan keuangan desa berbasis pembangunan berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM desa dalam perencanaan dan pelaporan, serta pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk memastikan

penggunaan dana desa sesuai tujuan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJMDes. Perlu juga adanya mekanisme evaluasi tahunan terhadap kinerja keuangan dan pencapaian tujuan pembangunan desa dengan melibatkan indikator yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan kata lain, besarnya dana yang dialokasikan tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pembangunan desa, terutama jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas tata kelola, transparansi anggaran, dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan. Dengan demikian diperlukan analisis kinerja keuangan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan desa mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Analisis kinerja keuangan desa adalah proses untuk menilai sejauh mana pemerintah desa berhasil menjalankan kegiatan di bidang keuangan dalam kurun waktu tertentu (Anugeraheni & Yuniarta, 2022). Dalam konteks ini, analisis terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peran penting karena dapat menjadi acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan di masa mendatang. Melalui analisis tersebut, pemerintah desa dapat mengevaluasi pencapaian target kinerja keuangan, menilai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul selama proses pengelolaan berlangsung (Ode & Asri, 2022).

Salah satu alat analisis yang dapat digunakan sebagai pengukuran penilaian kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Rasio keuangan merupakan angka yang dihasilkan dari perbandingan antara suatu pos di dalam laporan keuangan dengan pos lainnya. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode

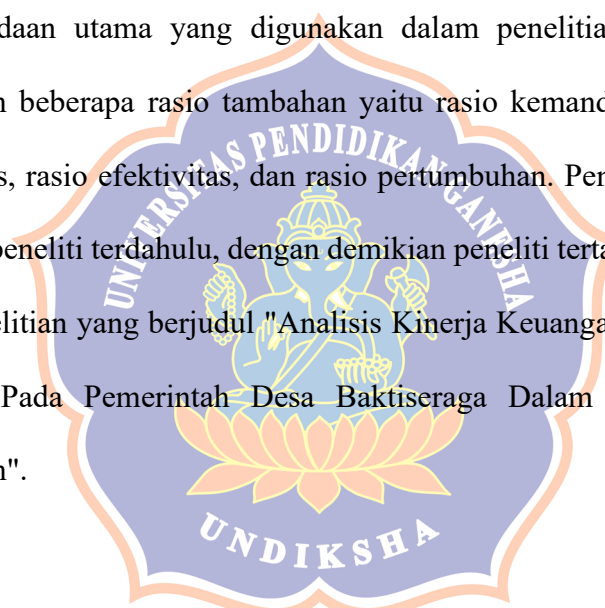
dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Awani & Hariani, 2021). Melalui pendekatan ini, pemerintah desa tidak hanya dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi keuangannya, tetapi juga dapat merancang kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa pengelolaan dana desa berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya dimasa depan.

Analisis kinerja keuangan juga bertujuan dalam pengelolaan dana desa di Desa Baktiseraga dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Minimnya kajian yang secara khusus menilai keterkaitan antara rasio kinerja keuangan dan capaian pembangunan desa di wilayah wisata menjadikan penelitian ini penting dilakukan. Dengan menggunakan indikator seperti rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, aktivitas, dan pertumbuhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan sistem pengelolaan keuangan desa secara akuntabel dan berkelanjutan.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh (ANJELI, 2024) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Tanjung Kabupaten Kampar mengumpulkan dana desa yang diterima setiap tahunnya terus meningkat dari tahun ke tahun, dan terdapat dinamika dalam realisasi dan pemanfaatannya yang perlu diteliti, salah satu permasalahan yang muncul adalah ketidaksesuaian antara besarnya anggaran yang diterima dengan tingkat realisasi yang dicapai, di mana pada beberapa tahun terjadi penurunan efektivitas maupun pertumbuhan pendapatan dan belanja. Penelitian yang dilakukan oleh (SUPRIANTI, 2021)

Berdasarkan data realisasi anggaran Desa Sumber Sari dari tahun 2016 s.d. 2020, terlihat bahwa penggunaan dana desa mengalami naik turun setiap tahunnya. Walaupun secara umum anggaran yang digunakan sudah cukup tinggi, namun tidak semua tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran desa. Misalnya pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah dana yang cukup besar karena ada tambahan dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun, besarnya dana tersebut juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal bagaimana dana itu bisa dikelola secara efisien dan berkelanjutan.

Perbedaan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan beberapa rasio tambahan yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini di adaptasi dari peneliti peneliti terdahulu, dengan demikian peneliti tertarik lebih dalam untuk meneliti penelitian yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Baktiseraga Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan".



## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama terletak pada ketidakkonsistenan realisasi anggaran Dana Desa di Desa Baktiseraga selama periode 2020 s.d. 2024. Meskipun Desa Baktiseraga termasuk desa wisata maju yang memiliki berbagai potensi ekonomi dan sosial, laporan realisasi APBDes menunjukkan fluktuasi capaian anggaran dari tahun ke tahun. Terutama pada tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan dalam besaran anggaran, namun persentase realisasinya justru mengalami penurunan drastis menjadi

80,05%, jauh di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya yang berada di atas 94%. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi masalah dalam efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal perencanaan dan implementasi program. Selain itu, tingginya selisih antara anggaran dan realisasi pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa belum seluruh dana dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini hanya akan membahas bagaimana kinerja keuangan Desa Baktiseraga dikelola, khususnya yang bersumber dari Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa selama tahun 2020 sampai 2024. Fokusnya adalah melihat apakah pengelolaan dana tersebut sudah berjalan dengan baik dan digunakan secara efektif serta efisien dengan pengukuran rasio keuangan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di desa. Penelitian ini tidak membahas secara detail proyek fisik atau pengaruh dari luar desa, tapi lebih memfokuskan kepada pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis kinerja keuangan pemerintah Desa Baktiseraga dalam pengelolaan Dana Desa yang diterima setiap tahunnya?

2. Sejauh mana kinerja keuangan pemerintah Desa Baktiseraga dalam mengelola Dana Desa dapat an dan pemerintah Desa Baktiseraga dalam pengelolaan Dana Desa yang diterima setiap tahunnya.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan dan pemerintah Desa Baktiseraga dalam pengelolaan Dana Desa yang diterima setiap tahunnya.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan pemerintah Desa Baktiseraga dalam mengelola Dana Desa dapat mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan teori-teori terkait tata kelola keuangan publik di tingkat desa, serta memperkuat literatur tentang pentingnya pengelolaan Dana Desa yang efektif dan berkelanjutan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Desa Baktiseraga dalam meningkatkan kinerja pengelolaan dana Desa. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa, sehingga pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### b. Bagi Masyarakat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mengawasi serta berkontribusi dalam pengelolaan dana Desa.

### c. Bagi Pihak Akademisi dan Peneliti Lain.

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk melakukan studi lanjutan terkait pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas pemerintahan desa, maupun topik- topik lain yang relevan dalam rangka mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.